

Research

Strategi pengembangan ekonomi regional dengan pendekatan *sectoral economic analysis* di Provinsi Kepulauan Riau

Siti Ahyuni^{1,*}, Siti Lailatul Latipah², Nasarudin³

¹ Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

² Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; sitilailatulatipah@gmail.com

³ Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; nasara626@gmail.com

* Correspondence: yuniah981@gmail.com; Tel.: +6285780083863

Received Date: 23 Mei, 2023

Revised Date: 20 Juli, 2023

Accepted Date: 26 Juli, 2023

Cite This Article:

Ahyuni, S., Latipah, S. L. & Nasarudin. (2023). Strategi pengembangan ekonomi regional dengan pendekatan *sectoral economic analysis* di Provinsi Kepulauan Riau. *Economic Military and Geography Business Review*, 1(1), 19-37.

<https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i1.2023.102>



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The Riau Islands Province is a self-governing strategic region with abundant natural resources in agriculture, maritime, and industry, resulting in higher per capita income than other provinces. According to the Central Statistics Agency (BPS), Riau has abundant natural resources. However, it is still classified as a country with the highest unemployment rate, ranking third after Java with 8.52%. As a result, Riau's GRDP level is still in the middle-income category, where groups have income levels between the low and high-income categories. This research uses a sectoral approach to analyze and determine regional development steps according to critical sectors in Riau with the Analytical Hierarchical Process (AHP) methodology. It focuses on local activity areas. The research method applied is a sector analysis approach, which includes LQ and DLQ analysis, shift share, and class typology. Based on research from Economic Growth, Riau has nine potential economic sectors: agriculture, manufacturing, hotels and restaurants, construction, transportation, telecommunications, mining, financial services, business services, and real estate. These sectors provide the basis for formulating government policies that will absorb labor and wage levels to narrow unemployment and then increase the regional Gross Domestic Product (GRDP), which Riau can hope will increase.

Keywords: AHP; leading sector; PDRB; sectoral approach

Abstrak

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah strategis berpemerintahan sendiri dengan sumber daya alam yang melimpah baik di bidang pertanian, kelautan maupun industri, sehingga menghasilkan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Riau dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, namun masih tergolong negara dengan tingkat pengangguran tertinggi, peringkat ketiga setelah Jawa dengan 8,52%. Akibatnya, tingkat PDRB Riau masih berada pada kategori pendapatan menengah dimana kelompok yang memiliki tingkat pendapatan di antara kategori pendapatan rendah dan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan langkah-langkah pembangunan daerah menurut sektor-sektor kunci di Riau dengan metodologi *Analytical Hierarchical Process* (AHP) menggunakan pendekatan persektoral. Hal tersebut berfokus pada area kegiatan lokal. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan analisis sektor yang mencakup analisis LQ

dan DLQ, shift share, serta tipologi kelas. Berdasarkan riset dari Pertumbuhan ekonomi, Riau memiliki sembilan sektor ekonomi potensial: pertanian, manufaktur, hotel dan restoran, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, pertambangan, jasa keuangan, jasa dunia usaha serta real estate. Sektor-sektor memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang akan menyerap tenaga kerja dan tingkat upah untuk mempersempit pengangguran dan kemudian meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah dapat diharapkan Riau akan meningkat.

Keywords: AHP; PDRB; pendekatan sektoral; sektor unggulan

1. Pendahuluan

Di era otonomi daerah, informasi tentang kondisi ekonomi daerah berfungsi bagi perencanaan pembangunan daerah. Upaya untuk menjelaskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan potensial pada sektor-sektor yang disesuaikan pada pembangunan daerah. Langkah-langkah yang dinilai tepat dan strategis dalam rencana pembangunan daerah adalah langkah-langkah pembangunan ekonomi daerah yang menitikberatkan pada pembangunan daerah yang merupakan isu terpenting bagi daerah (Wiranto, 2007). Menurut empiris Wulandari & Afriyanni (2021), Pembangunan wilayah bisa dijalankan dengan pengembangan sektoral yang memiliki keunggulan pada pengurangan tingkat pengangguran di sekitarnya, terutama dalam pembangunan dan pengangguran di wilayah Riau.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam Daerah Otonom Strategis, seluas 9.662,92 km², penduduk berjumlah 12,69 juta jiwa dan kepadatan penduduk 1.134 jiwa/km² (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, dan potensi daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di setiap daerah. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kegiatan perekonomian yang didukung sembilan sektor potensial, yakni Bidang-bidang seperti pertanian, pengolahan industri, konstruksi, pertambangan, serta sektor hotel dan restoran merupakan sektor-sektor penting dalam perekonomian, telekomunikasi, real estat, dan layanan lainnya, dengan tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 20,91%. Keterlibatan tenaga kerja akan membantu dalam peningkatan perekonomian yang semakin tumbuh sebesar 5,81% pada tahun 2019 (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Teori pembangunan dalam studi Rostow (1959), telah memverifikasi bahwa tingkat sektor potensial meningkat, dan aliansi jalur investasi pembangunan memang didukung oleh faktor pembangunan yang tepat. Kenapa data sektoral Riau tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan walaupun total kekayaan sumber daya alam potensial dari berbagai sektor setiap tahunnya sangat besar, masalah pengangguran menjadi akar permasalahan tersebut. Hal tersebut telah terbukti sebagai sumber masalah. Menurut BPS Provinsi Kepulauan Riau (2018), menyatakan bahwa tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ketiga setelah pulau Jawa, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Riau mencapai 8,52% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. Karena tingginya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan PDRB menempati urutan ke-17 diantara Provinsi Jawa dengan rata-rata PDRB Rp 48,46 juta (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Hal ini merujuk studi sebelumnya Khairiyakh et al. 2016; Basri et al. 2019; Fitriawati et al. 2018, perkembangan sektor-sektor unggulan Riau masih belum optimal, hal ini menandakan pendapatan Riau masih tergolong pendapatan menengah (*Middle Income*).

Fenomena analisis sektor dalam penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan wilayah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui pengenalan analisis sektor di Provinsi Kepulauan Riau yang penting dan dibutuhkan dalam perjalanan pembangunan ekonomi. Adanya pengembangan sektor ekonomi lokal merupakan surplus terpenting dari kebijakan pemerintah untuk mengelola sektor-sektor kunci yang membantu

mengurangi pengangguran dan meningkatkan produk nasional bruto di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Konteks Literatur

2.1. Teori pertumbuhan ekonomi

Teori pertumbuhan Harrod-Domar diperkenalkan oleh dua ahli ekonomi, yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Pertama kali, konsep ini diusulkan oleh Harrod dan kemudian dikembangkan oleh Domar menerbitkan teori tersebut dalam *American Economic Review* tahun 1947, pada tahun 1939, Dan Harrod menerbitkannya dalam *Economic Journal*. Menurut Sukirno (2006), teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar bertujuan untuk menjelaskan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh suatu perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan jangka panjang.

Kapasitas keuangan telah mencapai titik maksimum, dengan simpanan yang sejajar dengan pendapatan nasional, dan rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap stabil. Ekonomi terdiri dari dua sektor. Teori Harrod-Domar ada beberapa asumsi yang mendasari teori ini, yaitu dalam kondisi *full employment*, ekonomi terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pendapatan nasional proposional dengan simpanan masyarakat dan kecenderungan menabung, atau kecenderungan marginal untuk menyimpan adalah tetap. Selain itu, rasio modal terhadap output dan rasio pertumbuhan modal terhadap output tetap.

2.2. Teori pembangunan ekonomi

Pengembangan daerah adalah proses peningkatan secara menyeluruh berbagai potensi yang dimiliki setiap daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya (Nugroho & Rochimin, 2004). Penyusunan rencana pengembangan daerah tidak dilakukan secara tidak beraturan, melainkan lebih mengutamakan aspek ekonomi yang terkait dengan lokasi dan ruang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dalam masyarakat (Nurzaman, 2012). Perencanaan strategis pengembangan daerah harus berhasil mengurangi kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan wilayah.

Tahap mula dalam proses pembangunan daerah hampir besar, menciptakan disparitas dan ketimpangan antar daerah seiring percepatan pertumbuhan. Umumnya beberapa faktor antara lain menyebabkan semakin melebarnya disparitas antar daerah (Friedman & Weaver, 1979):

- a. Perpindahan individu yang sangat efektif (usia kerja) dan terampil dari wilayah kategori berkembang ke wilayah yang lebih maju.
- b. Penanaman modal umumnya diterapkan di wilayah yang berkembang, dikarenakan pasarnya yang sedang berkembang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan.
- c. Suatu Kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah maju.
- d. Di wilayah yang sudah terdepan, siklus dan aktivitas perdagangan didominasi oleh sektor industri.

Pembangunan daerah dalam konteks strategi pembangunan bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi dan sistem sosial, dengan upaya untuk menjadi bagian pemecah masalah menjadi sebuah solusi terpadu terhadap tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Apabila rencana pembangunan daerah memenuhi ketiga pilar proses pembangunannya, maka rencana pembangunan daerah akan menjadi semakin penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi pada aspek daerah. Pembangunan daerah memiliki tiga pilar, yaitu (Nugroho & Rochimin, 2004):

1. Keunggulan Komparatif (*imperfect mobility of factor*)

Pilar ini mengacu pada kondisi yang membuat mobilisasi relatif sulit atau hambatan untuk menemukan sumber daya khusus di seluruh wilayah (Ada beberapa faktor yang bersifat khas atau endemik, seperti iklim dan budaya, yang merupakan bagian integral dari suatu wilayah).

2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*)

Pilar konsentrasi adalah peristiwa luar yang secara ruang mempengaruhi aktor ekonomi dengan meningkatkan keuntungan ekonomi.

3. Biaya Transportasi (*imperfect mobility of good and service*)

Dasar ini memiliki dampak penting pada aktivitas ekonomi dengan Dalam proses produksi dan pembangunan wilayah, terdapat faktor yang harus diperhatikan dan signifikan yaitu berupa biaya transportasi antara jarak dan waktu.

Salah satu langkah untuk mengurangi ketimpangan dan ketimpangan dalam proses pembangunan daerah adalah membangun landasan sektoral yang komprehensif. Landasan industri yang solid dapat meningkatkan keuntungan lokal yang terkait dengan tersedianya faktor produksi, termasuk sumber daya alam dan modal manusia yang memainkan peran krusial dalam proses produksi. Ketika SDA dan SDM menjadi lebih dominan di suatu daerah, aliran modal dan migrasi akan mengubah keunggulan komparatif daerah greenfield lainnya. Hal ini dapat membuat dampak dasar bagi daerah untuk mempertimbangkan sektor-sektor yang baik untuk memprediksi disparitas pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensinya.

2.3. Teori basis ekonomi

Teori basis ekonomi menurut Tarigan (2005), Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh sejauh mana pertumbuhan ekspor yang terjadi dari wilayah tersebut. Konsep dasar ini terdiri dari dua domain yang berbeda, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis meliputi sektor ekonomi yang beroperasi di dalam dan di luar wilayah, sedangkan sektor non basis memperoleh barang dan jasa untuk penduduk yang tinggal di dalam wilayah tersebut.

Idea utama dari teori dasar ini adalah bagaimana tingkat ekspor dapat mempengaruhi arah dan pertumbuhan suatu wilayah. Sektor ekonomi dasar dan non-dasar lokal dapat diidentifikasi menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Analisis LQ dan DLQ digunakan untuk menguji tingkat spesialisasi suatu sektor atau sektor basis dengan membuat perbandingan peran mereka dalam meningkatkan perekonomian lokal berasal dari kegiatan industri yang sama di perekonomian secara umum (Emilia & Imelia, 2006).

2.4. Sektor unggulan

Sektor utama merupakan sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor lainnya, jika dilihat dari yang memberikan masukan dalam proses produksi maupun yang menggunakan produk sebagai masukan (Widodo, 2006). Sektor utama adalah sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan tidak hanya terletak secara geografis tetapi juga merupakan bagian dari berbagai jalur ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Sektor primer biasanya merujuk pada perbandingan regional, nasional atau global. Dalam konteks global, sektor yang dapat bersaing dengan sektor yang serupa di negara lain dianggap sebagai sektor primer. Pada tingkat nasional, sebuah sektor dianggap sebagai sektor utama apabila mampu bersaing dengan sektor yang serupa yang diproduksi di lokasi lain di pasar dalam negeri dan internasional atau jika dapat menarik perhatian pers. Sektor utama merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor lainnya, sektor utama ini

meliputi sektor yang menyediakan input serta sektor yang menggunakan produk sebagai input dalam proses produksi (Tjokroamodjojo,1993):

1. Sektor ini harus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Bidang ini merupakan bidang volume yang terukur tinggi.
3. Sektor ini mempunyai keterkaitan lintas sektor yang tangguh baik pada sektor mendatang maupun ke lampau.
4. Ini adalah bidang di mana nilai tambah tinggi dapat dibuat.

2.5. Produk domestik regional bruto

Kelimpahan Sumber Daya Alam di Berbagai Daerah Data Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah merupakan parameter yang penting untuk menilai situasi perekonomian daerah tersebut selama kurun waktu tertentu. PDRB daerah mengacu pada total nilai tambah atau pendapatan yang dihasilkan oleh usaha dan jasa di suatu daerah (Sukirno, 2006). Total PDB dapat dijelaskan sebagai hasil penjumlahan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh semua pelaku ekonomi di suatu wilayah (BPS Riau, 2018).

Tingkat PDB regional yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mencerminkan kemajuan ekonomi wilayah tersebut (Arsyad, 2010). PDB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau parameter pertumbuhan ekonomi tahunan (Sukirno, 2006). Tarigan (2005) mengemukakan bahwa dalam menentukan nilai PDRB melalui tiga pendekatan, diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan produksi dihitung dari unit produksi yang beragam di wilayah tersebut selama periode waktu tertentu.
- b. Pendekatan Earnings dihitung berdasarkan semua faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi lokal selama periode waktu tertentu (umumnya satu tahun).
- c. Estimasi pengeluaran dihitung dari semua faktor Konsumsi pribadi rumah tangga biasa, negara, pembentukan modal tetap bruto, perubahan penawaran dan ekspor neto.

3. Bahan Studi dan Data

Kajian ini berfokus pada pembahasan tentang pondasi dan sektor unggulan dengan mengkaji sejauh mana kemajuan daerah di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal lapangan kerja dan tingkat upah. Penelitian ini menggunakan sebuah metode pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan data yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan melalui wawancara dengan narasumber terkait. Survei dipimpin oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Riau dan dilakukan selama dua minggu pada bulan Maret 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Riau. Sementara data sekunder yang digunakan adalah data PDRB provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian, yakni :

1. Wawancara atau Interview

Untuk mendapat kesimpulan dalam analisis AHP, kami melakukan teknik wawancara atau interview. Teknik tersebut dilakukan secara langsung disertai dengan beberapa narasumber untuk setiap pertanyaan yang diajukan sebagai bobot data. Wawancara Dinas Perindustrian dan Perindustrian Kepulauan Riau dilakukan untuk

mendapatkan data yang lebih akurat melalui pembobotan data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan bidang-bidang utama tersebut.

2. Laporan Terpublikasi

Dalam penelitian ini, data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk analisis LQ, shift share, dan tipologi klassen. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) harga tetap selama empat tahun terakhir (2016-2019) dan data tingkat ketenagakerjaan dan upah. Data ini dilaporkan oleh BPS-nya di Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan metode untuk mengolah data AHP serta PDRB adalah berdasarkan metode LQ, *shift share* dan tipologi klassen, serta alat yang digunakan perangkat lunak format Ms. Excel untuk mendapatkan hasil serta kesimpulannya dari data yang terkumpul. Data disiapkan secara sistematis, diinterpretasikan, disajikan dan digunakan dalam diskusi selanjutnya.

3.1. Analisis data

Analisis dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan analitis sektoral dengan menggunakan metodologi *Analytical Hierarchical Process* (AHP). Mengkaji data guna menentukan sektor yang memiliki dampak signifikan dengan menggunakan beberapa teknik analisis yang relevan untuk penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Location Quotient (LQ) adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis basis ekonomi, sedangkan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan reposisi sektor basis. Perbedaan kedua analisis tersebut hanya terletak pada tujuannya. *Location Quotient* (LQ) bertujuan untuk mengetahui mana sub sektor basis dan non-basis yang dimiliki oleh suatu daerah. Sementara *Dynamic Location Quotient* (DLQ) dapat digunakan untuk mengetahui yang mana sub sektor basis dan non-basis dalam jangka per tahun atau per periode yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun rumus matematis LQ dan DLQ, antara lain :

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan :

vi = penghasilan tenaga kerja pada sektor ke- i pada suatu daerah

vt = penghasilan tenaga kerja pada seluruh sektor pada suatu daerah

Vi = penghasilan tenaga kerja pada sektor ke- i pada suatu daerah yang lebih luas

Vt = penghasilan tenaga kerja pada seluruh sektor pada suatu daerah yang lebih luas

Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga kriteria, yaitu :

$LQ > 1$: Sektor memiliki keunggulan komparatif.

$LQ = 1$: Sektor tidak memiliki keunggulan komparatif.

$LQ < 1$: Sektor non-basis.

Hasil perhitungan analisis LQ yang diperoleh nantinya dapat berguna untuk mengetahui sektor mana yang menjadi basis dalam daerah tersebut. Apabila nilai LQ yang diperoleh semakin tinggi, maka keunggulan komparatif pada daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa analisis LQ memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah LQ merupakan alat analisis yang mudah digunakan dan dapat menunjukkan struktur ekonomi negara dan industri potensial untuk

menggantikan impor atau barang ekspor yang dapat dibuat dan menunjukkan sektor potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Sedangkan kelemahannya termasuk bahwa analisis LQ hanyalah kesimpulan sementara dan hanya merupakan indikator kasar yang deskriptif. Hal itu juga memperhitungkan struktur ekonomi masing-masing daerah. Hal ini mengingatkan bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja serta sumber daya yang dapat dikembangkan tidak sama di setiap wilayah.

$$DLQ = \left[\frac{(1+gj)/(1+Gj)}{(1+gi)/(1+Gi)} \right]^t$$

Keterangan :

gj = nilai laju pertumbuhan pada sektor ke-i di tingkat regional

Gj = nilai rata-rata laju pertumbuhan pada sektor ke-i di tingkat regional

gi = nilai laju pertumbuhan pada sektor ke-i di tingkat nasional

Gi = nilai rata-rata laju pertumbuhan sektor ke-i di tingkat nasional

t = selisih tahun akhir dan tahun awal dalam perhitungan

Hasil perhitungan DLQ menghasilkan dua kriteria, yaitu :

$DLQ > 1$, maka perkembangan sektor i di regional lebih cepat dibanding sektor nasional.

$DLQ < 1$, maka perkembangan sektor i di regional lebih lambat dibanding sektor nasional.

2. Analisis *Shift-Share*

Shift-share merupakan teknik analisis dengan fungsinya untuk melihat perubahan struktur kinerja ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional (N_{ij}), pergeseran proporsi (M_{ij}), dan pergeseran diferensial (C_{ij}). Metode ini dapat memberikan jawaban mengenai bagaimana perkembangan suatu daerah yang dimana dapat ditunjukkan berdasarkan keadaan struktur perekonomian serta pertukaran beberapa sektor unggulan dalam dua jangka waktu. Metode ini juga berguna untuk mengetahui kedudukan suatu daerah dengan daerah yang lebih luas. Metode *shift-share* dimulai dengan mengetahui tingkat pertumbuhan pada suatu daerah yang mana dalam penelitian ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara daerah yang lebih luas dalam penelitian ini adalah Indonesia. Adapun rumus matematis *Shift-share*, antara lain :

(1) $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$ (Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah).

(2) $N_{ij} = E_{ij} \times r_n$ (Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional).

(3) $M_{ij} = E_{ij}(r_{in} - r_n)$ (Pengaruh Bauran Industri).

(4) $C_{ij} = E_{ij}(r_{ij} - r_{in})$ (Pengaruh keunggulan kompetitif).

3. Tipologi *Klassen*

Metode analisis Tipologi *Klassen* berfungsi untuk mengklasifikasikan tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah berdasarkan pendapatan per individu dan pertumbuhan ekonomi. Metode ini melibatkan pembagian data ke dalam kategori-kategori berdasarkan ukuran rata-rata. Metode analisis ini membantu dalam memahami pola dan struktur pertumbuhan sektor di daerah tersebut. Nilai klasifikasi kelas dapat ditentukan dengan membuat perbandingan antara pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan wilayah lain (nasional). Kemudian, dapat membandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per individu suatu daerah dengan PDB per individu daerah referensi (nasional).

Adapun penafsiran nilai Tipologi *Klassen*, antara lain :

	$si > s$	$si < s$
--	----------	----------

$g_i > g$	“Sektor maju dan Tumbuh Cepat”	“Sektor Berkembang Cepat”
$g_i < g$	“Sektor Maju Tetapi Tertekan”	“Sektor Relatif Tertinggal”

Keterangan :

g_i = laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau.

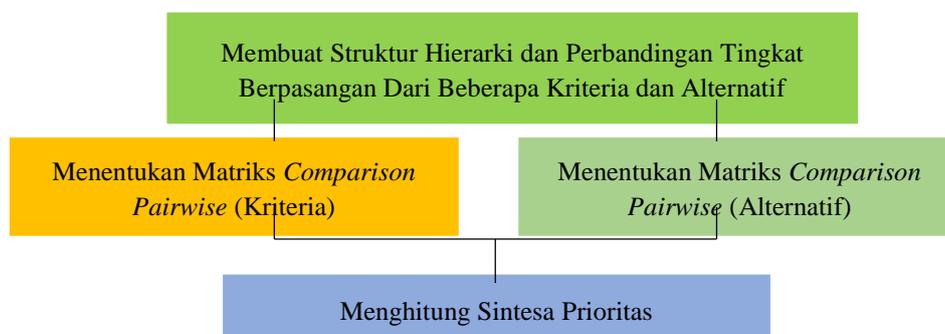
s_i = kontribusi PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau.

g = laju pertumbuhan PDB sektoral nasional.

s = kontribusi PDB sektoral nasional

4. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analisis AHP merupakan suatu metode analisis data yang menggunakan pendekatan logis menggabungkan penalaran dan nilai-nilai pribadi untuk mengambil keputusan dan membuat skala baru untuk mengukur sifat-sifat yang dihadapi. AHP adalah sebuah model yang dirancang oleh Thomas L dan Saaty dimana dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah yang melibatkan faktor dan kriteria yang kompleks. Dalam AHP, faktor-faktor tersebut diorganisasikan dalam bentuk hierarki yang memudahkan analisis dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi (Saaty, 1993). Metode ini membantu penulis dalam menentukan bobot untuk setiap indikator dari hasil wawancara yang telah diproses menggunakan metode AHP. Kelebihan metode AHP ini yaitu memiliki tingkatan struktur sebagai dampak dari kriteria yang kita pilih hingga pada subkriteria yang paling dalam. Metode ini juga mampu mengevaluasi keabsahan dan tingkat toleransi ketidak-konsistensi dari berbagai kriteria dan pilihan yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Namun, metode ini pun memiliki beberapa kelemahan yaitu metode ini sangat bergantung pada input utamanya yang terdiri dari pemahaman para ahli tentang cara mendapatkan subjek dari para ahli yang lain. Demikian pula, berdasarkan evaluasi dari para ahli, sulit untuk memberikan nilai yang lebih tidak akurat. Metode HP juga tidak memiliki pengujian statistik sehingga tidak ada model kebenaran. Metode AHP memiliki format langkah yang berbeda, sebagai berikut :



Gambar 3.1 Sistematika Analisis Data HP

Sumber: Saaty, Thomas (1993)

Adapun tingkat kepentingan dari nilai pembobotan pada matriks perbandingan, dapat dilihat dari tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Intensitas Kepentingan AHP

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya

7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,5,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

(Sumber: Olahan data)

3.2. Penelitian terdahulu

Menurut Masloman (2018), alat analisis pergeseran saham digunakan untuk melakukan analisis pertumbuhan ekonomi, potensi daerah, dan daya saing Kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil survei diketahui bahwa kelima sektor tersebut memiliki kelebihan perbandingan dan dapat dikembangkan serta dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan wilayah Minahasa Selatan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi wilayah di wilayah Minahasa Selatan.

Menurut Rahayu (2021), kajian analisis pembangunan ekonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Kerinci dengan menggunakan alat analisis indeks posisi (LQ) dan rasio lapisan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor dasar dan sektor industri merupakan sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan.

Menurut Setyowati (2013), survei dilakukan untuk menganalisis pengembangan sektor potensial di Kabupaten Klaten Wilayah Wonoslaten-Suboska dengan menggunakan alat analisis seperti indeks lokasi (LQ), proporsi lapisan, dan kelas tipologi. Berdasarkan analisis, sektor-sektor yang memiliki potensi perkembangan di Kabupaten Klaten meliputi sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor keuangan dan jasa dunia usaha, sektor pertambangan, sektor konstruksi, sektor komersial, serta sektor jasa seperti perhotelan dan restoran.

Menurut Mandala (2013), sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis struktur pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang memiliki potensi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan metode analisis Indeks Lokasi (LQ). Dari survei tersebut terungkap bahwa basis ekonomi Kota Batam dan Provinsi Karimun sendiri berbeda. Di mana basis ekonomi Kota Batam: sektor industri, sektor pengolahan, listrik, gas, air bersih, perdagangan,

Menurut Suryani (2019) dalam melakukan survei pembangunan ekonomi regional dan daya saing: Survei sektor utama dan kompetitif di wilayah Diyarbakir-Sanlıurfa Turki menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ) dan shift share. Berdasarkan hasil kajian, potensi ekonomi kota Tegaltinggi berdasarkan analisis LQ tahun 2012, ($LQ > 1.1$) adalah wajib penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, pendidikan kedinasan, air bersih dan pembuangan sampah. Manajemen material, daur ulang, jasa lainnya, real estate, akomodasi dan catering, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan, informasi dan komunikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perkembangan sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau

Penetapan pengembangan wilayah-wilayah strategis dengan mempertimbangkan konsep efisiensi dan potensi ekonomi wilayah merupakan langkah awal yang penting dalam upaya mencapai pembangunan yang terarah. Setiap wilayah perlu memahami sektor ekonomi mana yang memiliki potensi unggulan agar pemerintah dapat mengoptimalkan sektor-sektor tersebut (Basuki dan Gayatri, 2009). Dalam konteks pengembangan sektor-sektor utama di Provinsi Riau, struktur ekonomi memungkinkan penentuan sektor-sektor tersebut dengan melihat dua perspektif: tingkat lapangan kerja dan tingkat gaji.

Untuk mengetahui industri mana yang berkinerja lebih baik, kami membandingkan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah merupakan faktor-faktor yang penting dalam

pembangunan ekonomi suatu wilayah untuk setiap industri di Provinsi Kepulauan Riau (wilayah yang dianalisis) dengan PDB negara tersebut (wilayah referensi). Analisis Perbandingan tingkat pekerjaan dan upah berdasarkan LQ. Berikut hasil perhitungan analisis LQ dan DLQ Kepulauan Riau dengan menggunakan data harga konstan PDRB 2019.

Tabel 2. Hasil Analisis LQ dan DLQ Pada Sektor Potensial Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	Rerata LQ	Rerata DLQ	Keterangan
1. Pertanian	0.45	1.07	Reposisi Basis
2. Pertambangan	0.90	0.87	Non Basis
3. Industri Pengolahan	6.06	3.32	Basis/Unggulan
4. Transportasi dan Angkutan	1.77	1.63	Basis/Unggulan
5. Konstruksi Bangunan	0.30	1.21	Reposisi Basis
6. Restoran dan hotel	0.76	1.32	Reposisi Basis
7. Informasi dan Komunikasi	0.36	1.01	Reposisi Basis
8. Real Estate	1.25	1.36	Basis/Unggulan
9. Jasa Keuangan dan Jasa Perusahaan	0.61	1.21	Reposisi Basis

(Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Bagaskara & Zainal \(2017\)](#), Menurutnya, perekonomian Riau masih bertumpu pada industri tersier seperti transportasi, real estate dan sektor industri. Sebagaimana dipaparkan hasil analisis LQ dan DLQ, ada tiga sektor yang dominan atau unggulan baginya dari sembilan sektor potensial: industri pengolahan, transportasi dan angkutan, serta real estate. Ketiga sektor tersebut menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja dan tingkat upah tertinggi di Riau.

Pada Tabel 2 di atas, dapat kita lihat bahwa lapangan usaha pertambangan berada pada sektor non-basis. Hal ini berarti usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau belum dapat melakukan ekspor ke luar wilayah dikarenakan usaha pertambangan yang dilakukan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan wilayah tersebut saja dan masih terbatas. Jika dilihat, usaha pertambangan ini memiliki rerata LQ yang lebih tinggi yaitu sebesar 0.90 dibandingkan kelima reposisi basis, di antaranya usaha pertanian, konstruksi bangunan, restoran dan hotel, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan jasa perusahaan. Akan tetapi, usaha pertambangan mendapatkan nilai rerata DLQ yang rendah dibandingkan kelima lapangan usaha tersebut. Dimana nilai rerata DLQ usaha pertambangan yang sebesar $0.87 < 1$, yang berarti bahwa perkembangan sektor i di tingkat regional cenderung lebih lambat dibandingkan pada sektor nasionalnya. Hal tersebut yang pada akhirnya menyebabkan usaha pertambangan menjadi usaha yang berada pada sektor non-basis.

Hal ini juga konsisten dengan studi penelitian yang telah dilakukan oleh [Mandala \(2013\)](#) yang menyimpulkan bahwa usaha pertambangan memang tidak dapat menjadi basis ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa industri pengolahan memang merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai LQ yang tinggi.

Dapat dibandingkan juga PDRB Kepulauan Riau dengan PDB negara setiap tahunnya untuk melihat kinerja berbagai sektor ekonomi relatif terhadap tahun dasar analisis dan akhir analisis. Nilai PDRB yang lebih tinggi untuk suatu wilayah berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa wilayah tersebut sedang mengalami

ledakan ekonomi. Analisis *shift share* dapat di aplikasikan serta digunakan untuk mengamati struktur produksi ekonomi dengan menyoroti pertumbuhan sektor Riau dibandingkan dengan sektor yang sama secara nasional. Modifikasi struktur dan kinerja relatif perekonomian Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan perekonomian ekonomi nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi daerah (N_{ij}), kombinasi industri (M_{ij}), dan keunggulan persaingan (C_{ij}). Berdasarkan analisis *shift share*, terdapat sembilan sektor di Riau yang menunjukkan potensi pertumbuhan sektoral tertinggi yang mendukung pertumbuhan PDB nasional.

Tabel 3. Hasil Analisis *Shift-share* PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
	$E_{ij} \times r_n$	$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$	$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
1. Pertanian	992.299	1.104.843	1.417.592	3.514.734
2. Industri Pengolahan	4.160.806	11.470.326	39.331.427	54.962.559
3. Konstruksi Bangunan	536.178	131.900	310.641	978.719
4. Pertambangan	335.672	223.850	6.827.692	7.387.214
5. Restoran dan hotel	43.175	2.231.083	164.975	2.439.233
6. Transportasi dan Angkutan	3.281.405	8.762.913	17.954.175	29.998.493
7. Informasi dan Komunikasi	1.207.200	2.708.778	503.233	4.419.211
8. Real Estate	1.733.706	4.660.480	29.998.351	36.392.537
9. Jasa Keuangan dan Jasa Perusahaan	781.453	3.054.665	2.464.977	6.301.095

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (Diolah)).

Dari hasil *analisis Shift-share*, 9 sektor potensial yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB nasional adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (N_{ij}) sebesar Rp4.160.806.452 atau 32,13%, Bauran Industri (M_{ij}) sebesar Rp11.470.326.264 atau 39,50% dan keunggulan bersaing (C_{ij}) sebesar Rp39.331.427 atau 57,48%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Suharto \(2013\)](#) yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh relatif cepat dibandingkan dengan PDRB secara nasional.

Tingkat kontribusi Riau terhadap sektor-sektor kunci tidak mencukupi untuk menggambarkan pola pertumbuhan percepatan sektor ekonomi daerah. Dengan demikian, analisis tipologi *klassen* digunakan sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan PDRB dan kontribusinya berdasarkan sektor-sektor yang dikelompokkan atau dikarakteristikkan sesuai dengan tipologi *klassen*.

Tabel 4. Klasifikasi Tipologi Klassen Pada Sektor Unggulan di Provinsi Kepulauan Riau

	<i>si > s</i>	<i>si < s</i>
<i>gi > g</i>	(Sektor Maju dan Cepat Tumbuh) <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan - Transportasi - <i>Real estate</i> 	(Sektor Berkembang Cepat/Potensial) <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan - Hotel dan Restoran
<i>gi < g</i>	(Sektor Maju Tapi Tapi Tertekan) <ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan Komunikasi - Pertanian 	(Sektor Relatif Tertinggal) <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Keuangan dan Jasa perusahaan - Konstruksi

(Sumber : Hasil Analisis Data, 2020. (diolah))

Keterangan :

g_i = laju pertumbuhan PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau.

s_i = kontribusi PDRB sektoral Provinsi Kepulauan Riau.

g = laju pertumbuhan PDB sektoral nasional.

s = kontribusi PDB sektoral nasional.

Sektor yang tergolong Maju dan Berkembang Cepat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Manufaktur, Transportasi dan Real Estate, sedangkan yang tergolong Cepat atau Potensial adalah Pertambangan, Hotel dan Restoran. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi serta pertanian juga termasuk kategori sektor maju tapi terbelakang. Di sisi lain, sektor konstruksi, jasa keuangan, dan jasa dunia usaha dianggap sebagai sektor yang relatif tertinggal.

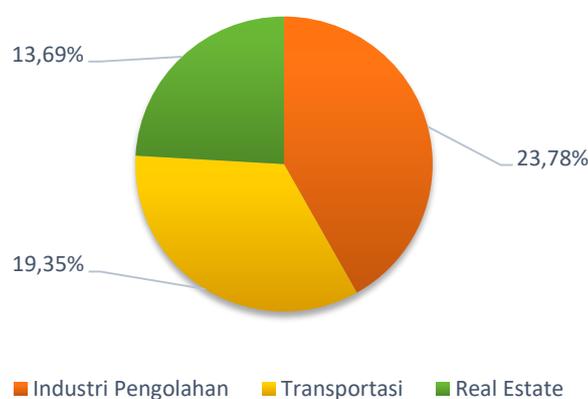
Sembilan divisinya di Provinsi Kepulauan Riau secara umum berkontribusi terhadap perekonomian, yang pada gilirannya berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan upah, membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Mengetahui sektor yang maju maka sektor ini dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Langkah yang baik agar seluruh lapangan usaha tersebut dapat berjalan secara optimal setelah adanya pengklasifikasian tersebut seharusnya memberikan solusi pada tiap jenis kelasnya. Bagi sektor yang tergolong maju dan berkembang cepat, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu terus meningkatkan output dan membentuk kesempatan kerja pada wilayah tersebut. Bagi sektor yang tergolong maju tetapi tertekan, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hendaknya mempercepat pertumbuhan dengan memperbanyak output dan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Bagi sektor yang tergolong cepat/potensial, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong lapangan usaha sektor pertambangan serta hotel dan restoran agar menjadi sektor unggulan di wilayah tersebut. Sementara untuk sektor dengan kategori relatif tertinggal seperti jasa keuangan dan jasa perusahaan serta konstruksi, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan harus berada di atas pertumbuhan ekonomi wilayah nasional. Pemerintah juga dapat mempercepat pertumbuhan output pada wilayah tersebut.

4.2. Kontribusi sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat (Arsyad, 2010). Peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah meningkatkan pendapatan di wilayah tersebut, sementara penurunan aktivitas ekonomi di suatu wilayah menurunkan pendapatan di wilayah tersebut (Setiyaningrum, et.al., 2013). Dari sini terlihat dimana struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh sektor dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang merupakan pelaku utama kegiatan daerah.

Dari tahun 2016 hingga 2019, struktur ekonomi Riau didominasi oleh industri manufaktur, transportasi, dan real estate. Hampir setengah sektor ekonomi Riau didukung oleh tiga sektor teratas. Pada tahun 2019, sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,82% terhadap tingkat penggunaan tenaga kerja (BPS Ketenaga Riau Karya, 2019). Namun, di antara tiga sektor dengan tingkat penggunaan tenaga kerja tertinggi, manufaktur mencapai 23,78%.

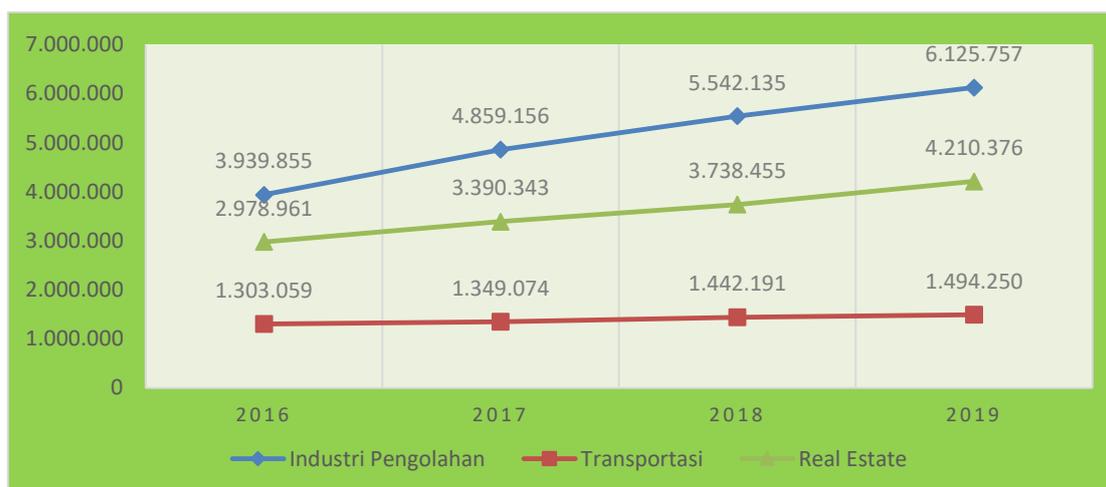


Angka 1. Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

(Sumber : BPS Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah)).

Dari segi struktur industri, industri manufaktur masih mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja, dengan Sektor unggulan tersebut memiliki keunggulan tersembunyi, dengan 1,27 juta karyawan (23,78%) yang merupakan peningkatan sekitar 10.000 orang dibandingkan dengan sektor transportasi dan real estate. Sementara itu, sektor transportasi mempekerjakan 1,03 juta orang (19,35%), sedangkan sektor real estate mempekerjakan 729.000 orang (13,69%), keunggulan komparatif, dan kemampuan menyerap tenaga kerja yang sangat baik.

Tidak hanya penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan Kepulauan Riau juga terlihat pada tingkat upah. Upah yang tinggi sangat ditentukan oleh masuknya tenaga kerja ke dalam sektor yang merupakan kegiatan utama masyarakat. Oleh karena itu, besar kecilnya tiga sektor utama di Kepulauan Riau yaitu manufaktur, transportasi dan real estate dapat memiliki efek sinergis terhadap kenaikan upah masyarakat.



Angka 2. Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Peningkatan Upah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019.

(Sumber : BPS Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, 2019 (diolah))

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor-sektor unggulan Provinsi Kepulauan Riau meningkat signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Rata-rata kenaikan upah minimum regional di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 33,3% untuk setiap kenaikan upah sektor utama. Dari ketiga sektor tersebut, manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan upah, dengan valuasi sebesar Rp.6.125.757 pada tahun 2019. Untuk mencapai stabilitas ekonomi diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan upah riil dan lapangan kerja. Dari segi sektor, pertumbuhan gaji dan penerimaan tenaga kerja di sektor-sektor utama semakin menjadi fokus karena memiliki pangsa pasar terbesar dalam perekonomian dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan.

4.3. Strategi pengembangan sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau

Mencermati hasil dari perhitungan yang dilakukan mulai dari analisis LQ dan DLQ, *shift share* dan tipologi Klassen mengungkapkan bahwa peningkatan lapangan kerja merupakan prioritas utama dalam memilih kebijakan pembangunan sektor kunci di Riau dan tingkat upah. Hal ini sangat penting mengingat Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah strategis otonom di Sumatera dalam hal kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah dan tingkat lapangan kerja dan upah.

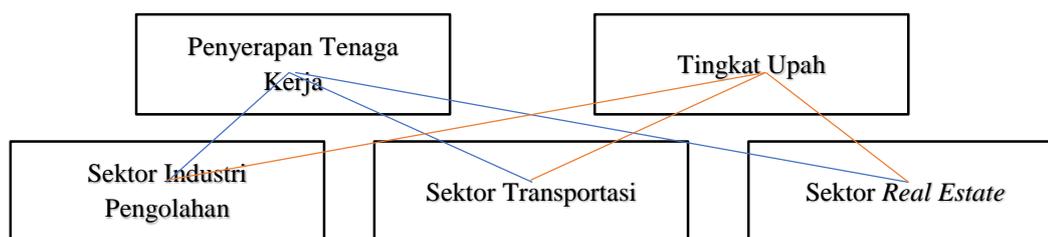
Tabel 5. Prioritas Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan

Prioritas Kebijakan	Bobot
Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	0.533
Peningkatan Tingkat Upah	0.467

(Sumber : Data Analisis Diolah, 2020)

Struktur model dari analisis AHP merupakan model pohon optimal. Satu-satunya tujuan dari model treetop adalah untuk mewakili tujuan dari masalah keputusan. Bobot keputusan berada pada 100% poin pada lembar dan mewakili kriteria kualitatif dan kuantitatif. Pembobotan ini dibagi di antara titik referensi sesuai dengan peringkatnya.

Sektor Unggulan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau



Angka 2. Penyusunan Hierarki Pada Kebijakan Pengembangan Sektor Unggulan di Provinsi Kepulauan Riau

(Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2020)

Hasil analisis dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui *Comparison Pairwise* kriteria dan alternatif, dalam Provinsi Kepulauan Riau, sektor unggulan dengan prioritas tertinggi dari level kriteria adalah penyerapan tenaga kerja, dengan nilai sebesar 0,533. Sementara itu, pada level alternatif, sektor industri pengolahan menjadi prioritas utama berdasarkan kriteria penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah.

Tabel 6. Hasil Analisis Perbandingan Matriks *Comparison Pairwise* Kriteria dan Alternatif Sektor Unggulan di Provinsi Kepulauan Riau

Kriteria	Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Upah	Skala Bobot	Prioritas	
Penyerapan Tenaga Kerja	0.67	0.40	1.07	0.533	
Tingkat Upah	0.33	0.60	0.93	0.467	
Jumlah	1.00	1.00	2.0	1.00	
Penyerapan Tenaga Kerja	Sektor Industri	Sektor Transportasi	Sektor Real Estate	Skala Bobot	Prioritas
Sektor Industri	0.63	0.32	0.27	1.22	0.408
Sektor Transportasi	0.21	0.54	0.27	1.02	0.339
Sektor Real Estate	0.16	0.14	0.47	0.76	0.253
Jumlah	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
Tingkat Upah	Sektor Industri	Sektor Transportasi	Sektor Real Estate	Skala Bobot	Prioritas
Sektor Industri	0.55	0.18	0.43	1.16	0.385
Sektor Transportasi	0.27	0.55	0.29	1.10	0.368
Sektor Real Estate	0.18	0.27	0.29	0.74	0.247
Jumlah	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00

(Sumber : Hasil Analisis Data, 2020. (diolah))

Yang terpenting, berdasarkan hasil analisis AHP, kondisi di lapangan menunjukkan kinerja sektor manufaktur Kepulauan Riau mampu bersaing dengan daerah lainnya. Industri manufaktur Kepulauan Riau tidak hanya berdaya saing, tetapi juga dapat mendongkrak lapangan kerja dan tingkat upah di masyarakat. Setelah hasil perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria dan setiap alternatif diketahui, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan hasil perbandingan matriks menggunakan perhitungan komposit. Hasil konsolidasi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan

pemerintah dalam pengembangan industri manufaktur penyerap tenaga kerja dan upah di Kepulauan Riau.

Tabel 7. Hasil Sintesa Pada Prioritas Strategi Kebijakan Pengembangan Sektor Industri di Provinsi Kepulauan Riau

Kriteria	Hasil Sintesa
Mendorong Percepatan Klaster Industri dan Investasi Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	0.397
Peningkatan Daya Saing dan Upah Minimum Regional	0.353

(Sumber : Analisis data, 2020 (diolah)).

Penentuan prioritas dalam pengembangan sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya didasarkan pada penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah, tetapi juga memperhitungkan kualitas teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Produk yang dihasilkan dengan potensi unik dari Kepulauan Riau memiliki daya saing yang tinggi. Peningkatan dalam tiga sektor utama Kepulauan Riau akan menghasilkan peningkatan produksi yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan tingkat upah di masyarakat. Situasi serupa terjadi di bidang lain, sehingga pengembangan tiga bidang teratas yang berpusat pada manufaktur akan mendorong pembangunan daerah (*regional developing*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Langkah-langkah terpilih dalam pengembangan sektor-sektor unggulan Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah Riau. Dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan Dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan upah, pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memanfaatkan potensi sektor-sektor unggulan untuk mendongkrak produk domestik bruto (PDB) daerah Kepulauan Riau.

5. Kesimpulan

Berdasarkan teknik analisis LQ dan DLQ, shift share dan tipologi kelas, sembilan sektor potensial di Riau yang menjadi sektor utama atau dominan di Riau yaitu sektor manufaktur, transportasi dan real estate menunjukkan hasil yang penting. Tiga sektor teratas ini tergolong sektor maju dan cepat tumbuh serta memiliki keunggulan komparatif dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga sektor teratas Riau, manufaktur, transportasi dan real estate, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja dan tingkat upah. Namun, sektor yang paling banyak menyumbang tenaga kerja dan tingkat upah di Riau adalah manufaktur.

Berdasarkan hasil Analisis Hirarki Proses (AHP), keutamaan kebijakan dalam pembangunan sektor terkemuka di provinsi Kepulauan Riau adalah berfokus pada pengoptimalan dalam bidang pekerjaan dan kenaikan gaji. Keutamaan kebijakan peningkatan pekerjaan menduduki hal yang diutamakan dengan diberikan bobot 0,533, diikuti oleh tarif kenaikan gaji dengan bobot 0,467, diikuti oleh industri manufaktur dengan bobot 0,408, transportasi dengan bobot 0,339, dan real estate dengan bobot 0,339 hingga 0,253. Keutamaan kebijakan utama dalam pengembangan sektor-sektor utama yang berkaitan dengan tenaga kerja dan standar upah di Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor manufaktur.

Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemprov Riau untuk mengurangi pengangguran adalah kebijakan pembangunan prioritas dengan perhatian kategori proporsional berdasarkan potensi sektor unggulan. Sebagai sektor utama, manufaktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Riau. Oleh karena itu, Perdana Menteri harus memprioritaskan pembangunan yang berdampak signifikan

terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

6. Saran

Makalah ini mengakui sejumlah kekurangan, terkait dengan kurangnya pembahasan mendalam di beberapa unit analisis. Hal ini dikarenakan kurangnya data yang dapat peneliti peroleh saat wawancara karena sebagian data yang dimaksud merupakan rahasia pemangku kepentingan. Kelemahan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti akan memberikan saran terkait analisis yang dihasilkan yaitu untuk sektor yang tergolong maju dan cepat berkembang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu terus meningkatkan output dan menciptakan lapangan kerja di daerah. Untuk sektor-sektor yang tergolong maju namun tertekan, sebaiknya Pemprov Kepri mengakselerasi pertumbuhan dengan meningkatkan output dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Untuk sektor yang tergolong cepat/potensial, Pemprov Kepri terus mendorong sektor pertambangan serta hotel dan restoran menjadi leading sector di daerah. Sedangkan untuk sektor dengan kategori relatif tertinggal, seperti jasa keuangan dan jasa perusahaan dan konstruksi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan harus berada di atas pertumbuhan ekonomi daerah nasional.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, S.A. dan N.

Kurasi Data, S.L.L

Analisis Formal, N.

Penyelidikan, N.

Metodologi, S.A.

Validasi, S.A.

Visualisasi, S.L.L.

Menulis – Draf Asli, S.A., S.L.L. dan N.

Menulis – Meninjau & Mengedit, S.A., S.L.L. dan N.

Pendanaan:

Free APC Article.

Penyataan Dewan Tinjauan Etis:

Tinjauan dan persetujuan etis dibebaskan untuk penelitian ini karena sebagai kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan dan publikasi etis.

Pernyataan Informed Consent:

Persetujuan tertulis telah diperoleh dari peserta untuk menerbitkan makalah ini.

Konflik Kepentingan:

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Referensi

Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. Yogyakarta : STIM YKPN.

- Basri, S., Taryono, T., Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2019). Productivity Analysis and Disparities of Agricultural and Industrial Development in Riau Province. *Journal of Economics and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.7176/JESD/10-22-15>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2018. Kepulauan Riau di Tingkat Nasional 2018. Kepulauan Riau : Badan Pusat Statistik. <https://kepri.bps.go.id/publication/2018/08/16/067191cfe018858596646c64/provinsi-kepulauan-riau-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik. 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen. Badan Pusat Statistik Press. Jakarta. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2019. Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau 2019. Kepulauan Riau : Badan Pusat Statistik. <https://kepri.bps.go.id/publication/2020/04/27/74d35a62a4b88e47f9dfe5ba/indikator-ketenagakerjaan-provinsi-kepulauan-riau-2019.html>
- Basuki, A. T., & Gayatri, U. (2009). Penentu sektor unggulan dalam pembangunan daerah: studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal ekonomi & studi pembangunan*, 10(1), 34-50. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1280>
- Bagaskara, A. D., & Arifin, Z. (2017). Analisis potensi Sektor Unggulan dan Pergeseran Struktur Perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 75-92. <http://202.52.52.6/index.php/jie/article/view/6067>
- Emilia dan Imelia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Jurusan Ilmu Ekonomi, FE. Universitas Jambi. Jambi.
- Fitriawati A.N., Triwanto J., & Syarifuddin A. (2018). Kajian Pengembangan Silvofishery Di Lahan Mangrove Desa Budeng, Kabupaten Jembrana, Bali. *Journal of Forest Science Avicennia*. 1 (1): 13 - 16. <https://doi.org/10.22219/avicennia.v1i2.5599>
- Friedman, John & Weaver, Clyde. 1979. Territory & Function – The Evolution of Regional Planning. London : Edward Arnold.
- Masloman, I. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Sektor Yangpotensial Dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 1-11.
- Mandala, H. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kota Batam Dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 175-193. <https://doi.org/10.22212/jekp.v4i2.52>
- Nugroho, I. Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES.
- Nurzaman SS. 2012. Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia. Penerbit ITB.
- Khairiyakh, R., Irham, I., & Mulyo, J. H. (2016). Contribution of Agricultural Sector and Sub Sectors on Indonesian Economy. *Ilmu Pertanian (Agricultural Science)*, 18(3), 150. <https://doi.org/10.22146/ipas.10616>
- Rahayu, S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kerinci (2008-2017). *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 104-115.
- Setyowati, S. (2015). Analisis Pengembangan Sektor Potensial Kabupaten Klaten Dalam Kawasan Subosukawonosraten. *Economics Development Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/edaj.v3i4.2526>
- Saaty, T. L. (1993). *The Analytical Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Pers. Saaty, T. Lorie. 1990. *Decision Making The Analytical Hierarchy Process*. United States of America : McGraw – Hill.
- Suharto, U. S. (2013). Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Banten (Periode Tahun 2002-2011). Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

- <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/65941>
Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1139124>
- Suryani, A. sri. (2019). Analisis Location Quotient Dan Shift Share Pascabencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah. *Kajian Ekonomi Indonesia*, 24(1), 57–74.
- Setiyaningrum, A. Hakim, A. Mindarti, L.I. (2013). Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kudus. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(4), 680-686.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/441>
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=349200>
- Tjokroamodjojo, B. (1993). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga.
- Wulandari, S. N., & Afriyanni, A. (2021). Tourism Development Policy and Their Impact on the Regional Economy in the Riau Islands Province. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 293–305.
<https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.293-305>
- Wiranto, T. 2007. *Pembangunan Wilayah Pesisir Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah*. BAPPENAS. Jakarta.
- Wijayanti, D. (2002). Bedah Buku: Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(2).
<https://doi.org/10.20885/vol7iss2aa667>
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.